

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>angka</b>	<b>73.03</b>
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>persentase</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	378
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	54
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1
II	<b>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>angka</b>	<b>93</b>
B	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)</b>	<b>persentase</b>	<b>78</b>
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	60

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target
15	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	permohonan	12
16	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	200
17	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	4
18	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	konten	700
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital</b>	<b>Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah</b>	<b>angka</b>	<b>93</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI</b>	<b>Nilai aspek strategi dan rencana</b>	<b>angka</b>	<b>1.22</b>
		<b>Nilai aspek tata kelola</b>	<b>angka</b>	<b>1.91</b>
		<b>Nilai aspek teknologi digital</b>	<b>angka</b>	<b>3.22</b>
	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
19	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	perangkat daerah	1
20	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	dokumen	2
21	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	dokumen	1
<b>IV</b>	<b>Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>angka</b>	<b>2.80</b>
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK</b>	<b>Nilai domain prinsip SDI</b>	<b>angka</b>	<b>2.5</b>
		<b>Nilai domain kualitas</b>	<b>angka</b>	<b>2.7</b>
		<b>Nilai domain proses bisnis</b>	<b>angka</b>	<b>2.92</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
22	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	persentase	50
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	orang	30
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi</b>	<b>angka</b>	<b>87</b>
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>
24	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	1

Padang Panjang, 26 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HARRY RIZKA PERDANA, S.IP, M.Si

Nip. 19871004 200701 1 002